

**PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT
PERSPEKTIF POLITIK ISLAM
(Studi di Desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo
Periode 2015/2019)”**



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
SITI RAHAYU
NIM. 1522303030

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

**Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam
(Studi di Desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo
Periode 2015/2019)**

**ABSTRAK
Siti Rahayu
NIM. 1522303030**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Prodi Hukum Tata Negara
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

Keberhasilan pembangunan sebagai suatu tolak ukur kesejahteraan masyarakat dalam suatu Desa tidaklah lepas dari peran Kepala Desa dan Masyarakatnya. Desa yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Kepala Desa dalam menjalankan kewajibannya terhadap tugasnya sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggungjawab yang besar terhadap kesejahteraan masyarakatnya melalui adanya pembangunan yang dilaksanakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran seorang kepala desa dalam mensejahterakan masyarakatnya melalui program-program pembangunan yang ada di Desa Kaliguwo dan bagaimana tinjauan politik islam terhadap peran kepala desa kaliguwo periode 2015/2019 dalam pelaksanaan pembangunan di desa kaliguwo sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa kaliguwo.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk document dan data sekunder dengan mengadakan studi pustaka (*library research*) berupa Kitab Fiqh, Peraturan Perundang-undangan, serta karya ilmiah lainnya. Data-data yang didapat selanjutnya dianalisa secara sistematis sesuai pokok pembahasan. Data-data di analisis menggunakan analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Peran Kepala Desa Kaliguwo Periode 2015/2019 dalam pelaksanaan pembangunan Desa Kaliguwo sebagai sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sudah cukup bagus, terlihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa kaliguwo melalui program-program pembangunan, yang meliputi pembangunan ekonomi untuk peningkatan hasil pendapatan masyarakat, pembangunan Pendidikan yang dapat memudahkan akses belajar para siswa, pembangunan infrastruktur untuk memudahkan akses kegiatan masyarakat, kesehatan dengan memudahkan pelayanan pengobatan masyarakat dan keamanan yang dapat membuat masyarakat merasa terjamin perlindungan dirinya. Dalam politik islam peran seorang kepala desa kaliguwo periode 2015/2019 dapat dikatakan sebagai pemimpin yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu mempertanggungjawabkan amanah dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin.

Kata Kunci: *Kepala Desa, Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Pemimpin.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Sistematika Penulisan	15

**BAB II LANDASAN TEORI KEPEMIMPINAN POLITIK DALAM ISLAM
DAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA**

A. Dasar Kepemimpinan Politik Dalam Islam.....	17
1. Definisi Kepemimpinan	17
2. Ciri-ciri Pemimpin Menurut Islam.....	23
3. Syarat-syarat Menjadi Pemimpin.....	26
B. Tugas dan Fungsi Pemimpin	27
1. Tugas Pemimpin	27
2. Fungsi Pemimpin	30
C. Peran Kepala Desa dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa .	31
1. Konsep Otonomi Desa.....	31
2. Kesejahteraan Masyarakat Desa.....	37
3. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa dalam Pembangunan	46
4. Peran Dan Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa	49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	56
B. Subjek dan Objek Penelitian	57
C. Lokasi penelitian	57
D. Sumber Data.....	58
E. Metode Pengumpulan Data	59
F. Metode Analisis Data.....	63

**BAB IV PANDANGAN POLITIK ISLAM TERKAIT PERAN
KEPALA DESA KALIGUWO PERIODE 2015/2019
DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEBAGAI
UPAYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT**

A. Gambaran Umum Desa.....	68
B. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.....	73
C. Pandangan Politik Islam Terkait Peran Kepala Desa Kaliguwo Dalam Pelaksanaan Pembangunan.....	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan sistem tatanan terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa² Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggara desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa), perangkat desa tersebut bertugas untuk membangun desa dan juga mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa termasuk juga dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 15 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa kewajiban Kepala Desa adalah :³ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebenarnya harus dikerjakan oleh kepala desa. Seorang pemimpin (kepala desa) harus memelihara hak-hak

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa* (Malang : Setra Press, 2015), hlm. 175.

² Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25.

³ Lihat pasal 15 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005.

rakyatnya termasuk hak kesejahteraan melalui program pelayanan maupun pembangunan dari pemerintah.

Demi tercapainya cita-cita negara termasuk desa. Menurut al-Mawardi seorang pemimpin harus mempunyai karakter, diantaranya yaitu ; Pemimpin harus menjadikan agama sebagai pedoman. Pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya. Keadilan yang menyeluruh yang dengannya akan tercipta kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpin, dan meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi.

Pemimpin harus mampu menjamin keamanan semesta yang akan memberi *inner peace* (kedamaian batin) kepada rakyat, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara. Pemimpin juga harus mampu menjaga kesuburan tanah air yang berkesinambungan, yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomis lainnya sehingga konflik antar penduduk dapat dikurangi dan teratasi. Pemimpin harus memberikan harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. al-Mawardi sangat memperhatikan secara serius tentang kepemimpinan (*imâmah*).⁴ Baginya pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat tentu saja tidak lepas dari Peran Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa. Kepala desa harus dapat menjalankan kepemimpinan dengan baik. Istilah pemimpin dalam al-

⁴ Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta : Qisthi Press, 2000), hlm. 11.

Qur'an, antara lain adalah *Ulil Amri*,⁵ sebagaimana firman Allah Surat an-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah swt, Rasulullah, dan ulil amri. Apabila ulil amri telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib untuk menaatinya dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan rosulnya yang telah diketahui secara mutawatir. *Ulil Amri* adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas dan mereka juga orang-orang yang mendapat kepercayaan dari umat.⁶

Seorang kepala desa harus mampu memimpin masyarakatnya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya. Termasuk amanah dalam hal upaya mensejahterakan masyarakat melalui adanya pembangunan-pembangunan yang ada di daerah wewenang kepala desa dalam mengemban tugasnya. Selain dari pemerintah desa faktor lain yang mendukung pembangunan demi kesejahteraan masyarakat adalah dari Masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang

⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta Utara : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, hlm. 69.

mendukung dan mempercayai pemimpinnya (*Ulil Amri*) sangat mempengaruhi kesuksesan dalam kinerja pemerintahan desa, demi terlaksanakannya pembangunan tersebut.

Pembangunan desa merupakan awal dari kemajuan bangsa. Di era otonomi daerah masyarakat di masing-masing desa di tuntut untuk siap dalam menghadapi beragam tantangan. Dengan kesiapan itu, desa-desa diharapkan bermetamorfosis menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.⁷ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan hakikat pembangunan nasional. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, sehingga mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, juga agar manusia tidak sombong dan arogan.

Kelemahan tersebut mendorong manusia untuk hidup berkelompok, bersatu, saling membantu, dan berusaha, sehingga akhirnya akan mendorong manusia untuk Membentuk suatu negara (*a state*). Artinya, lahirnya sebuah negara berawal dari keinginan manusia untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan umum mereka, dan juga berasal dari tuntutan akal sehat mereka yang memberi inspirasi untuk hidup saling membantu dan mengelola kelompoknya.⁸

Salah satu kepemimpinan dalam tingkat yang bawah adalah pemerintah desa. Peran kepala desa menjadi salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Kepala Desa dalam kepemimpinannya

⁷ I Indrajit, Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan* (Jakarta : Instans Publishing, 2014), hlm. 80.

⁸ Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraannya Dalam Islam", *Jurnal Unida Gontor* (Ponorogo : Universitas Darusalam Gontor, 2017), hlm. 160.

yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa yang sejahtera dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa memiliki wewenang dalam pelayanan pembangunan.

Desa yang maju dan sejahtera dapat dilihat dari adanya pembangunan yang berjalan dengan baik. Adanya pembangunan tentu saja tidak terlepas dari adanya Peran kepala desa dan pemerintahan desa untuk diberdayakan ditengah-tengah masyarakat luas. kepala desa juga harus peka dalam melihat apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri, guna tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat desanya. salah satunya yaitu seperti desa Kaliguwo. Kesejahteraan masyarakat desa Kaliguwo salah satunya dapat dilihat dalam hal pendidikan, pelayanan kesehatan, lingkungan, dan termasuk program Pembangunan. salah satunya yaitu adanya pembangunan di desa kaliguwo, seperti pembangunan jalan pembangunan jembatan, pembangunan TPQ, Irigasi, Sanggar belajar, pembangunan jalan antar dusun, dan lain sebagainya.⁹

Peran kepala desa di desa Kaliguwo sangat berpengaruh terhadap pembangunan-pembangunan di desa tersebut. Oleh karena itu perkembangan pembangunan dalam upaya mensejahterakan masyarakat desa Kaliguwo sangat besar pengaruhnya oleh kinerja apratur pemerintahan desa kaliguwo itu sendiri. Terlaksananya pembangunan di Desa Kaliguwo sebagai upaya mensejahterakan masyarakat desa tentu saja tidak terlepas dari pemerintah dan masyarakat desa kaliguwo untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

⁹ Observasi Awal Pada Tanggal 2 Januari 2018 Di Desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Jam 09.30.

Berdasarkan pemaparan di atas, alasan penulis memilih penelitian di Desa Kaliguwo karena desa kaliguwo tersebut termasuk salah satu desa plosok yang jauh dari perkotaan, namun desa plosok tersebut tidaklah menjadi alasan bagi kepala desa kaliguwo dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya. Seperti dalam beberapa tahun terakhir desa kaliguwo menjadi juara desa unggulan, selain itu desa kaliguwo juga pernah menjadi juara 2 STBM tingkat provinsi, juara 1 lomba posyandu dan lain sebagainya, dan pada periode 2015/2019 merupakan periode dimana banyak pembangunan-pembangunan yang terlaksana di Desa Kaliguwo dari pada periode-periode yang sudah-sudah. Dengan adanya pembangunan desa masyarakat mengalami banyak perubahan terutama dalam kesejahteraannya yang dapat dilihat dari perubahan ekonomi. Seperti adanya pembangunan jalan yang memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.¹⁰

Dalam upaya pelaksanaan pembangunan di desa tidaklah lepas dari tugas dan fungsi kepala desa dalam menjalankan kewajiban dan amanahnya sebagai pemimpin desa kaliguwo tersebut. Peran kepala desa, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tentu saja tidak lepas dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya Mensejahterakan masyarakatnya.¹¹ Hal tersebut mendorong penulis untuk meneliti tentang Peran Kepala Desa dan Pemerintahannya serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat desa di tinjau dari aspek politik Islam.

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Sutikno. Selaku Pengamat Pembangunan Desa Kaliguwo. Pada Tanggal 2 Januari 2019. Pukul 09. 30.

¹¹ Wawancara Dengan Kepala Desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Pada Tanggal 2 Januari 2019.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas, meneliti dan mempelajari serta menelaah lebih dalam dan lebih rinci dengan mengangkat dalam sebuah proposal penelitian dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam (Studi di Desa Kaliguwo Kec Kaliwiro Kab Wonosobo)”.

B. Definisi Operasional

1. Peran

Istilah peran banyak orang mengungkapkan dengan kedudukan atau posisi ada juga yang mengungkapkan tentang fungsi awalnya merupakan terjemahan dari kata *function*. Suatu yang menunjuk pada dibawakan ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu posisi dalam struktur sosial. Ada dua paham yang dipergunakan dalam mengkaji peran yakni paham strukturalisasi¹² dan intreraksi¹³.

Paham strukturalisasi lebih mengkaitkan antara peran-peran sebagai unit culture, serta mangacu pada perangkat hak dan kewajiban yang secara normative telah direncanakan oleh system budaya. Sedangkan paham intereaksi lebih memperlihatkan aktif-dinamis dari fenomena peran, terutama

¹² Strukturalisasi ini mencakup isu-isu yang berhubungan dengan watak tindakan manusia dan sebagai pelaku, bagaimana interaksi hubungannya dengan institusi-institusi serta upaya memahami konotasi-konotasi yang terjadi dalam praktek social, kbbi.web.id/struktur.

¹³ Interaksiosis merupakan cabang dari sosiologi yang membahas tentang cara seorang individu yang berperilaku dan membuat keputusan berdasarkan lingkungan individu tersebut, kbbi.web.id/interaksi.

setelah peran tersebut merupakan suatu perwujudan peran yang bersifat lebih hidup serta lebih organis.¹⁴

Dalam hal ini peran menjadi sadar akan struktur social yang didudukinya. Karenanya ia berusaha untuk selalu nampak mumpuni dan dipersepsi oleh pelaku lainnya sebagai tak menyimpang dari system harapan yang ada dalam masyarakat. Peran dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku nilai serta tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat.¹⁵

2. Kepemimpinan

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. Sebagaimana didefinisikan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert (1995), kepemimpinan adalah (*the process of directing and influencing the task related activities of group members*) Kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Lebih jauh lagi, Griffin (2000) membagi pengertian kepemimpinan menjadi dua konsep, yaitu sebagai proses, dan sebagai atribut. Sebagai proses, kepemimpinan difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, bawahan, atau yang dipimpinya, memotivasi mereka

¹⁴ Organisme bersifat dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. lektur.id/arti-organisasi.

¹⁵ Muhammad Nur Aris Shoim, "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman", *Skripsi* (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Adapun dari sisi atribut, kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka.¹⁶

3. Kepala Desa

kepala desa menjadi salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggara desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa), perangkat desa tersebut bertugas untuk membangun desa dan juga mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa termasuk juga dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁷

4. Pembangunan Desa

Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha peningkatan taraf hidup manusia ketingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih tentram, dan lebih nyaman, serta menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian, usaha pembangunan mempunyai arti humanisasi atau usaha memanusiakan manusia. Pembangunan dari dan untuk

¹⁶ Rahayu Ginintasi, "Kepemimpinan", *Direktori Fakultas Ilmu Pendidikan* (Bandung : Universitas Pendidikan Indonsia, 2012), hlm. 1-2.

¹⁷ Lihat pasal 15 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005.

manusia seutuhnya, berarti manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan yang berusaha menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hidupnya, dimulai dari lembaga tinggi negara seperti presiden sampai tingkat daerah dan desa.¹⁸ Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan hidup dan kehidupan masyarakat desa, yang mendiami kawasan perdesaan sebagai hajat dalam menghidupi kehidupannya.¹⁹

5. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan mutlak menjadi hak yang paling asasi bagi setiap warga negara.²⁰ Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan ini diwujudkan agar warga negara tersebut dapat hidup layak dan mampu menggambarkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, jika masyarakat sejahtera berarti masyarakat tersebut mengalami kemakmuran.

Kesejahteraan selalu dikaitkan dengan materi, dimana semakin tinggi produktivitas maka pendapatan yang dihasilkan pun akan semakin tinggi. Keluarga yang sejahtera dapat meningkatkan angka kemakmuran pada suatu daerah, yang nantinya akan menekan jumlah kemiskinan pada daerah

¹⁸ Muchamad Mirsa Kurniawan, "Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihawaras Bojonegoro Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah", *Jurnal Hukum Dan Perlindungan Islam*, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2016; ISSN 2089-0109 (Sidoarjo : Panwaslu Sidoarjo, 2016), hlm. 320-321.

¹⁹ I Indrajit, Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat*, hlm. 85.

²⁰ Lutfhi Kurniawan, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* (Malang: Instans Kerjasama, 2015), hlm. 12.

tersebut. Kesejahteraan itu sendiri adalah kondisi manusia yang orang-orangnya dalam keadaan sehat dan damai sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya.²¹ Dari paparan istilah-istilah judul di atas, maka yang dimaksud dengan judul Skripsi ini adalah Peran Kepala Desa Periode Dalam Pelaksanaan Pembangunan untuk Mensejahterakan Masyarakat Perspektif Politik Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam Pelaksanaan Pembangunan kesejahteraan masyarakat di Desa Kaliguwo Kaliwiro Wonosobo ?
2. Bagaimana peran kepala desa Kaliguwo kecamatan Kaliwiro dalam pelaksanaan Pembangunan kesejahteraan perspektif politik Islam ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh mana Peran Kepala Desa dalam upaya pembangunan guna tercapainya masyarakat yang sejahtera di desa Kaliguwo kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.
- b. Untuk mengetahui peran kepala desa Kaliguwo kecamatan Kaliwiro dalam pelaksanaan Pembangunan sebagai upaya mensejahterakan

²¹ Astriana Widyastuti, "Analisis Hubungan Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009" , *Journal Ekonomi Development Analysis*, edaj 1 (2) (2012) (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2012), hlm. 2-3.

masyarakat perspektif politik Islam di desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro kabupaten Wonosobo.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis.

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dan pengetahuan dibidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya pembangunan.
- 2) Dapat bermanfaat sebagai informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam bidang Hukum Tata Negara.

b. Manfaat praktis

- 1) Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai penyelenggaraan program pemerintahan desa.
- 2) Untuk memberikan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitanya dengan perimbangan yang menyangkut masalah ini.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sebagai kajian pustaka dan dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya. Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai peran kepala desa. diantaranya skripsi yang ditulis oleh :

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa terhadap peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan*” karya dari Lisa Oktavia Fakultas Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab seorang kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu tempat penelitian dan penelitian ini lebih memfokuskan pada peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya program pembangunan sedangkan penelitian di atas lebih memfokuskan pada kurang optimalnya kepala desa dalam menjalankan tugasnya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu sama sama membahas tentang peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.²²

Skripsi dengan judul “*Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kesejahteraan Umum*”. Yang ditulis oleh Ahmad Nuralif Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi tersebut membahas tentang proses pelaksanaan pembangunan desa dan kesejahteraan umum di tingkat desa.

Perbedaanya Penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu perbedaan tempat penelitian dan penelitian di atas memfokuskan proses pembangunan desa

²² Lisa Oktavia, *Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa terhadap peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

berkaitan dengan Otonomi Daerah dalam pembangunan dan kesejahteraan umum yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi desa. sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada peran kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya pelaksanaan program pembangunan desa. Sedangkan persamaannya yaitu sama sama membahas pembangunan desa sebagai salah satu cara untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.²³

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa Dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa* (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)”. Yang ditulis oleh Nabila Puspita Jurusan hukum tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang Kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang harus menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Kepala Desa dalam urusannya dibantu oleh perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

Perbedaannya yaitu Penelitian di atas memfokuskan pada Kinerja seorang Kepala Desa dalam memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa. Penelitian ini memfokuskan pada peran kepala desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui adanya program pembangunan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini adalah penelitian yang belum di teliti oleh orang lain.²⁴

²³ Muhammad Nur Aris Shoim, “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Taun 2014 Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

²⁴ Nabila Puspita, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa* (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)”, *Skripsi* (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, penyusun membuat sistematika sementara sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat gambaran umum dari penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yang meliputi cakupan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, dan sistematika penulisan.

BAB II Kepemimpinan Politik dalam Islam dan Kepemimpinan Kepala Desa yang terdiri dari dasar kepemimpinan politik dalam Islam, tugas dan fungsi pemimpin, dan peran kepala desa dalam mensejahterakan masyarakat desa.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini penulis akan memaparkan metodologi apa saja yang digunakan dalam penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu Penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV ANALISA DAN PENYAJIAN DATA, dalam bab ini, penulis akan memaparkan berupa : Gambaran umum lokasi penelitian pembangunan di desa Kaliguwo Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo, Peran Kepala Desa Kaliguwo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kaliguwo dan Analisis Pandangan Politik Islam Terkait Peran Kepala Desa Kaliguwo Dalam Pelaksanaan Pembangunan.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi ini. Serta, adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kepala Desa Kaliguwo Periode 2015/2019 dalam upaya mensejahterakan masyarakat desanya melalui program-program pembangunan yang meliputi 1). Pembangunan ekonomi seperti penyuluhan pertanian dan pemupukan berimbang yang dapat meningkatkan hasil pertanian masyarakat. 2) Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan antar sawah/kebun dan pembangunan jembatan antar desa yang dapat mempermudah kegiatan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. 3). Pembangunan Pendidikan seperti bantuan bagi siswa-siswa berprestasi dan kurang mampu dengan mencari program pendidikan gratis yang dapat memudahkan para siswa untuk melanjutkan pendidikannya. 4). Pembangunan kesehatan seperti pembangunan klinik kesehatan dan BPJS di desa kaliguwo yang dapat memudahkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam program pengobatan. Dan 5). Pembangunan keamanan seperti ditambahnya hansip dan pos kamling untuk menjamin rasa nyaman masyarakat desa dan membuat masyarakat desa kaliguwo merasa lebih terlindungi. Peran kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin dalam upaya mensejahterakan masyarakat sudah cukup baik, terbukti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui adanya program pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat desa kaliguwo yang terlaksana.

2. Tinjauan politik Islam terhadap peran kepala Desa Kaliguwo periode 2015/2019 dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat juga sudah cukup bagus dalam meningkatkan program-program pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat kaliguwo, dengan menerapkan arti nilai-nilai kepemimpinan sebagaimana mestinya yaitu untuk mengantikan kenabiah melalui menjaga agama dan mengatur perpolitikan dunia dengan menegakan keadilan, mempersatukan umat, mengelola ekonomi dan sumber daya umat untuk kemaslahatan bangsa dan rakyatnya, dengan menerapkan nilai keadilan dan menjalankan amanahnya sebagai pemimpin desa demi tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat Desa Kaliguwo melalui perubahan-perubahan kondisi masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa kaliguwo. Dalam kaidah fiqh di sebutkan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat yang di pimpinnya.

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa Kaliguwo dapat di kemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa Kaliguwo sebagai kepala pemerintahan untuk lebih meningkatkan nilai-nilai kesejahteraan khususnya dalam bidang Pendidikan keagamaan khususnya untuk kaum remaja agar terciptanya generasi penerus bangsa yang berpotensi dan berpegang teguh pada ketaqwaan terhadap Alloh SWT.

2. Diperlukan optimalisasi peran kepala desa dengan memaksimalkan info-info dan komunikasi dari luar daerah untuk bisa memaksimalkan dana desa turun dengan tepat waktu demi tercapainya pembangunan desa yang lebih baik.
3. Diharapkan tetap bisa menjaga komunikasi antara masyarakat desa dengan pemerintahan Desa Kaliguwo agar hubungan dalam program-program yang akan dijalankan dapat berjalan dengan sukses dengan adanya dukungan dan gotongroyong dari masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo . *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.
- Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takbir Islam*. Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah System Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta : Qisthi Press, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Karim*. Surakarta: Ziyad Book, 2009.
- Diana, Rashda. "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam". *Journal.unida.gontor*: Universitas Darusalam Gontor, 2017.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta Timur : Prada Media, 2003.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Dura, Justita. "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat". Malang : *Jurnal Jibeka*, 2016.
- Fuadi, Ariza. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme". Semarang : *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2015.
- Ginintasi, Rahayu. "Kepemimpinan". *Direktori Fakultas Ilmu Pendidikan*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonsia, 2012.
- Gitosaputro, Sumaryo, dan Kordiyani K. Ranga. *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hasyim, Yusnani dkk. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta Pusat : Rajawali Press, 2017.
- Ibn Muhammad bin Habib Basyri Bilghodadi Al-Mawardi, Ibnu Hasan 'ali. *الأحكام السلطانية والولايات الدينية*, Lebanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-Beirut, 2011.
- Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Badan Lintang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008.

- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta Selatan : Salemba Humanika, 2014.
- Hartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang : Setra Press, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2001.
- Kurniawan, Lutfhfi. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang : Intrans Kerjasama. 2015.
- Kurniawan, Muchamad Mirsa. *Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihawaras Bojonegaro Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah*. Sidoarjo : Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam. 2016.
- Lexy, J Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Madaniy, A. Malik. *Politik Berpayung Fiqh*. Yogyakarta : Pustaka pesantren, 2010.
- Notowidagjo, Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : Amah. 2016.
- Oktavia, Lisa. "Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan". *Skripsi*. Lampung : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden, 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
- Pulungan, Suyuti. *fiqh siyasah (ajaran sejarah dan pemikiran)*. Jakarta Utara : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Puspita, Nabila. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi di Desa Haduyang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan)". *Skripsi*. Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Sakdiah. "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofi) Sifat-Sifat Rasulullah". *Jurnal Al-Bayan*: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.
- Sangadji, Mamang Etta dkk. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Shoim, Muhammad Nur Aris. "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 Kecamatan

- Kalasan Kabupaten Sleman”. *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Sodiq, Amirus. “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”. *Jurnal Ekonomi Syariah Stain Kudus*, 2015.
- Soimin. Indrajit, Wisnu. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*. Jakarta: Instans Publishing, 2014.
- Solekhan, Moc. *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat*. Malang : setara press, 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Sunggoni, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Thamyis, Ahmad. *Konsep Pemimpin Dalam Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Umiarso & Baharudidin. *Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016.
- Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta :PT Bumi Aksara, 2006.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sinar Grafika.
- www.kompasiana.com/rumahusahaindonesia.blogspot.com.
- www.almanhaj.or.id/6529-persatuan-umat-islam.
- www.Sanitasi.net/peraturan-pemerintah-no-72-tahun-2005-tentang-Desa.
- www.kaliguwo-kaliwiro.wonosobokab.go.id.
- www.bps.go.id/publication/indikator-kesejahteraan-rakyat
- Zuhri, Muhammad Harifin. “Konsep Kepemimpinan Dalam Islam”. *Jurnal Pemikiran Islam*. Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2014.

Sumber lain :

Wawancara Dengan Bapak Kholid. selaku kepala desa periode 2015/2019, pada tanggal 17 September 2019.

Wawancara Dengan Bapak Badrudin. selaku tokoh agama di Desa Kaliguwo, pada tanggal 18 September 2019.

Wawancara Dengan Bapak Mahmudin. Kaur Pemerintahan Desa Kaliguwo, pada tanggal 17 September 2019.

Wawancara Dengan Ibu Sri Murwani. Ketua PKK Desa Kaliguwo, pada tanggal 16 September 2019.

Wawancara Dengan Bapak Samsi. Bendahara Pemerintahan Desa Kaliguwo, pada tanggal 18 September 2019.

Wawancara Dengan Bapak Samsidin. Karangtaruna Desa Kaliguwo, pada Tanggal 20 September 2019.

Wawancara Dengan Bapak Sugiono. Selaku Tokoh Pendidik di Desa Kaliguwo, pada tanggal 14 September 2019.

Wawancara Dengan Bapak Sutikno. Pengamat Pembangunan Desa Kaliguwo, pada tanggal 13 September 2019.